



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Sosial yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Juli 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP
NIP 198705192006021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Review Terhadap Rancangan P-RKPD	66
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	89
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	90
 BAB IV PENUTUP	167
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja	167
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	168
4.3. Rencana Tindak Lanjut	168

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan diatas secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) untuk periode tahunan serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berfokus pada Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sebagaimana terdokumentasi dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”***.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 juga mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2025 dengan Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat rentan dalam dampak pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Merupakan visi, misi, dan program prioritas (platform) serta arah kebijakan Gubernur Jawa Timur yang bertumpu pada Visi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu ***“Terwujudnya***

masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 serta untuk mendukung perwujudan Misi Dinas Sosial, yaitu :

Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

Dan menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan Perangkat Daerah, rencana kerja juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi. Artinya rencana kerja bisa mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini menfokuskan pada perubahan pada Tahun 2025 dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah. Perubahan Rencana Kerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 25. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah terhadap suatu perubahan atas

dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang telah disusun pada Tahun 2025.

- 1) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan pada tahun berjalan;
- 2) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan pada tahun berjalan;
- 3) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun berjalan;
- 4) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan pada tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk :

- 1) Mengantisipasi perubahan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan
- 2) Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Review Terhadap Rancangan P-RKPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (Nilai)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 inovasi

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh) sub kegiatan.

Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
5. Program Penanganan Bencana, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 34 sub kegiatan dengan hasil capaian realisasi anggaran sebesar 94,83%, dan capaian kinerja sebesar 103,50%.

Capaian Renstra Dinas Sosial pada tahun 2024 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1: ***“Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)”*** dengan indikator kinerja ***Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar***, Tahun 2024 target sasaran 91% terealisasi sebesar 97,97 dan tingkat capaian sebesar 107,66%.

Perhitungan rata-rata capaian sebesar 97,97 diperoleh dari formulasi Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial dibagi DTKS kali 100%.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 9.973.299.600,00 dan terserap sebesar Rp. 9.801.575.525,00 atau 98,28%.

b. Kinerja lainnya yaitu 1: ***“Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel”*** dengan indikator kinerja:

- 1) ***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***, realisasi Tahun 2024 sebesar 81,10 (A) dan tingkat capaiannya sebesar 100,12% dari target 81. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat.
- 2) ***Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah***, realisasi Tahun 2024 sebesar 94,83% dan tingkat capaiannya sebesar 98,68% dari target 96,10%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial.
- 3) ***Indeks Profesionalitas ASN***, realisasi Tahun 2024 sebesar 79,72% dan tingkat capaiannya sebesar 97,22% dari target 82. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari BKPSDM.

Kinerja lainnya yaitu 2: ***“Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah”*** dengan indikator ***Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan***, realisasi Tahun 2024 sebanyak 3 dan tingkat capaiannya sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Inovasi Dinas Sosial.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya sebesar Rp. 5.446.607.390,00 dan terserap sebesar Rp. 4.821.534.919,00 atau 88,52%.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai, dengan realisasi anggaran sebesar 88,52% dan capaian kinerja 99,74%.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target, anggaran terealisasi 85,15% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 84,43% dengan capaian kinerja 100%.

- (2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 85,85% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 87,50% dan capaian kinerja 98,68%.

Sub Kegiatan:

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran terealisasi 87,50% dengan capaian kinerja 98,68%.

Kegiatan:

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, anggaran terealisasi 95,76% dan capaian kinerja 100%.

Sub. Kegiatan:

- (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, anggaran terealisasi 94,76% dengan capaian kinerja 100%.

- (2) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 97,59% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan anggaran terealisasi 99,01% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 90,27% dengan capaian kinerja 100%.

- (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 96,00% dengan capaian kinerja 100%.

- (3) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, anggaran terealisasi 76,60% dengan capaian kinerja 100%.

- (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, anggaran terealisasi 98,69% dengan capaian kinerja 100%.

(5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran terealisasi 98,52% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, anggaran terealisasi 94,41% dan capaian kinerja 100%

Sub Kegiatan:

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, anggaran terealisasi 95,55% dengan capaian kinerja 100%.

(2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi,

anggaran terealisasi 92,09% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 5.446.607.390,00 dan terserap sebesar Rp. 4.821.534.919,00 atau 88,52% dengan capaian kinerja 99,74%.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Pencapaian kinerja program pemberdayaan sosial adalah Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 93,10% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi, anggaran terealisasi 93,10% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 96,52% dengan capaian kinerja 100%;

- (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 99,88% dengan capaian kinerja 100%;

(3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 91,34% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga yang terdiri dari Katar 304, LKS 45 (LKSA 41, LKSU 3, LKS ODGJ 1). Dengan total anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 544.677.600,00 terserap Rp. 507.092.900,00 atau 93,10% dengan capaian kinerja 100%.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, dengan anggaran tersealisasi 96,30% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, anggaran terealisasi 96,75% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

(1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 97,86% dengan capaian kinerja 100%;

(2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 93,84% dengan capaian kinerja 100%;

(3) Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 93,12% dengan capaian kinerja 100%;

(4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 100,00% dengan capaian kinerja 100%;

(5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 99,23% dengan capaian kinerja 100%;

- (6) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 88,54% dengan capaian kinerja 100%;

- (7) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,54% dengan capaian kinerja 100%;

- (8) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 97,84% dengan capaian kinerja 100%;

- (9) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan

Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 98,04% dengan capaian kinerja 100%;

(10) Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 98,74% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi, anggaran terealisasi 91,58% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 91,58% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 10 (sepuluh) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.725.190.300,00 terserap Rp. 1.661.350.375,00 atau 96,30% dengan capaian kinerja 100%.

4) **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan anggaran terealisasi 99,18% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah data fakir miskin yang dikelola, anggaran terealisasi 99,18% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 86,99% dengan capaian kinerja 100%;

- (2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 99,39% dengan capaian kinerja 100%;

- (3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 96,26% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 7.598.831.700,00 terserap Rp. 7.536.213.500,00 atau 99,18% dengan capaian kinerja 100%.

Anggaran Rp. 7.598.831.700,- tersebut digunakan untuk :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. DBHCHT | : Rp. 7,164,456,150,- |
| 2. PKH | : Rp. 160.700.000,- |
| 3. SEMBAKO/BPNT | : Rp. 16.645.000,- |
| 4. Pendataan DTKS | : Rp. 78.470.250,- |
| 5. Pendataan PMKS-PSKS | : Rp. 10.929.750,- |
| 6. PKH Banmas | : Rp. 167.630.550,- |

5) **Program Penanganan Bencana**

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, dengan anggaran terealisasi 92,65% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 90,75% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

- (1) Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)

Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 89,22% dengan capaian kinerja 100%;

(2) Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 93,70% dengan capaian kinerja 100%;

(3) Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Tagana yang dibina, anggaran terealisasi 93,68% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

(1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, anggaran terealisasi 93,68% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk

melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Yang mana pada pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Kegiatan pertama ada 3 (tiga) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 90.000.000,00 terserap Rp. 82.843.750,00 atau 92,65% dengan capaian kinerja 100%.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, dengan anggaran terealisasi 96,40% dan capaian kinerja 100%.

Kegiatan:

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,40% dan capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan:

(1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 96,40% dengan capaian kinerja 100%.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Dengan total anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 14.600.000,00 terserap Rp. 14.075.000,00 atau 96,40% dengan capaian kinerja 100%. Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 15.419.906.990,00 terealisasi sebesar Rp. 14.623.110.444,00 atau 94,83% dengan capaian kinerja 103,50%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk Triwulan IV sebagaimana tersebut Tabel 2.1.

Tabel 2.1. LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2024 TRIWULAN IV													
NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00	81,10	100,12								
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68								
		Indeks Profesionalitas ASN	82,00	79,72	97,22								
	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100,00								
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90	90	100,00				Okt - Des	5.446.607.390	4.821.534.919	88,52	
	1. Perencanaan, Penganggaran	Persentase Indikator	90	90	100,00					18.300.000	15.583.050	85,15	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target											
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	100,00					9.025.000	7.620.050	84,43	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6	100,00					9.275.000	7.963.000	85,85	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	94,83	98,68					4.548.488.000	3.979.753.656	87,50	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bln	12	100,00					4.548.488.000	3.979.753.656	87,50	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai	88	88	100,00					268.258.100	244.141.300	91,01	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kebutuhan											
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					96.493.200	87.106.000	90,27	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					50.000.000	48.000.000	96,00	
	3. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					50.000.000	38.298.300	76,60	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	100,00					19.906.900	19.647.000	98,69	
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	100,00					51.858.000	51.090.000	98,52	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	88	88	100,00					347.595.840	332.852.113	95,76	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	100,00					225.000.000	213.211.855	94,76	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	100,00					122.595.840	119.640.258	97,59	
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	90	100,00					263.965.450	249.204.800	94,41	
	1. Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	17	17	100,00					177.113.200	169.226.100	95,55	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8	100,00					86.852.250	79.978.700	92,09	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91	97,97	107,66								
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang	75	75	100,00	38	38		Okt - Des	544.677.600	507.092.900	93,10	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						100,00					
					Orang 349	Orang 349	100,00						
					Lembaga	Lembaga							
	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang 18 Orang 349 Lembaga	20 18 349	100,00 100,00 100,00	20 18 349	20 18 349	100,00 100,00 100,00		544.677.600	507.092.900	93,10	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20	100,00	20	20	100,00		3.975.000	3.836.600	96,52	
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18	100,00	18	18	100,00		109.866.600	109.740.000	99,88	
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	349 Lembaga	349	100,00	349	349	100,00		430.836.000	393.516.300	91,34	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			100,00	7.181.440	7.181.440	100,00	Okt - Des	7.598.831.700	7.536.213.500	99,18	
	1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	6.755.929	6.755.929	100,00	6.755.929	6.755.929	100,00		7.598.831.700	7.536.213.500	99,18	Pemahaman dan tingkat keaktifan Operator Desa terhadap DTKS masih kurang
			Keluarga										
			425.511	425.511	100,00	425.511	425.511	100,00					
			Keluarga										
			96 orang	96	100,00	96							(Sosialisasi tata cara pengusulan dan verval DTKS kepada Operator Desa)
				orang			96	100,00					

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6.755.929 Keluarga	6.755.929	100,00	6.755.929	6.755.929	100,00	7.181.440	89.400.000	77.773.500	86,99	
	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	425.511 Keluarga	425.511	100,00	425.511	425.511	100,00		7.341.801.150	7.297.077.500	99,39	
	3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96 Orang	96	100,00	96	96	100,00		167.630.550	161.362.500	96,26	
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50	50	100,00	9.479 Orang	9.479 Orang	100,00	Okt - Des	90.000.000	82.843.750	92,05	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		50.000.000	45.373.750	90,75	
	1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		40.000.000	35.688.750	89,22	
	2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		5.000.000	4.685.000	93,70	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.433 Orang	9.433	100,00	9.433	9.433	100,00		5.000.000	5.000.000	100,00	
	2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	46	100,00	46	46	100,00		40.000.000	37.470.000	93,68	
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	46	100,00	46	46	100,00		40.000.000	37.470.000	93,68	
5.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program	50	50	100,00	1.515	1.515	100,00	Okt - Des	1.725.190.300	1.661.350.375	96,30	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rehabilitasi Sosial				Orang							
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	1.335	100,00	1.335	1.335	100,00		1.575.190.300	1.523.985.375	96,75	
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	1050	100,00	1.050	1050	100,00		574.000.000	561.736.525	97,86	
	2. Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	50 Orang	50	100,00	50	50	100,00		210.000.000	197.062.750	93,84	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kewenangan Kabupaten / Kota											
	3. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	95	100,00	95	95	100,00		311.251.200	289.835.000	93,12	
	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	5.000.000	100,00	
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	50	100,00	50	50	100,00		426.000.000	422.730.000	99,23	
	6. Pemberian Bimbingan	Jumlah Peserta Bimbingan	10	10	100,00	10	10			5.000.000	4.427.000	88,54	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sosial kepada Keluarga Penyandang	Sosial kepada Keluarga Penyandang						100,00					
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang										
	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.827.000	96,54	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.892.000	97,84	
	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15	100,00	15	15	100,00		5.000.000	4.902.000	98,04	
	10. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20	100,00	20	20	100,00		28.939.100	28.573.100	98,74	
	2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	180 Orang	180	100,00	180	180	100,00		150.000.000	137.365.000	91,58	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Panti Sosial	dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi											
	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	180	100,00	180	180	100,00		150.000.000	137.365.000	91,58	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100	100	100,00	6 Makam	0	-	Okt - Des	14.600.000	14.075.000	96,40	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	6	100,00	6	6	100,00		14.600.000	14.075.000	96,40	
	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi	6	6	100,00	6	6	100,00		14.600.000	14.075.000	96,40	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	KINERJA			SASARAN PPKS - PSKS			WAKTU PELAKSA NAAN	ANGGARAN (Rp)			KENDALA / PERMASALAHAN
			TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nasional Kabupaten / Kota	Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Makam										
TOTAL										15.419.906.990	14.623.110.444	94,83	

Sumber Data Dinas Sosial

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut:

Tabel TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan Tahun Lalu (n.2)			Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan (Renja SKPD Tahun n.1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
								Target Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun (n.2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n.1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
				Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial									
				Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun n					100%	67	67	100%
					Nilai SAKIP Perangkat	81	80,48	80,50	80,98	100,60%	81	81,10	100,12%

					Daerah								
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10	90	90	95,53	106,14%	96,10	94,83	98,68%
					Indeks Profesionalitas ASN	82	65	64,24	78,01	98.83%	82	79,72	97,22%
				Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	3	1	1	2	200%	3	3	100%
06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah + jumlah Inovasi	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	82	60	60	78,01	130,02%	82	82	100%
06	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	130 Steel	0	0	0%	0	0	0%
06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlag orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	80%	90%	95,53%	106,14%	96,10%	94,83%	98,68%
06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	14 Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	85%	87%	87%	100%	88%	88%	100%
06	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%

06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	0	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	85%	87%	87%	100%	88%	88%	100%
06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	85%	85%	85%	100%	90%	90%	100%
06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	12 Bulan	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%
06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	3 Bulan	0	0	0%	0	0	0%
06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%

				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar								
06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	80%	75%	75%	100%	75%	75%	100%
06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga	100%	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	20 Orang, 18 Orang, 349 Lembaga	100%

06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	60 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	18 Orang	100%
06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	0	15 KUBE	0	0	0%	0	0	0%
06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	349 Lembaga	8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa)	100%	349 Lembaga	349 Lembaga	100%

06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	50%	60%	55%	55%	100%	50%	50%	100%
06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	18 Disabilitas, 9 Gepeng, 12 Bulan	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	181 Orang, 25 Orang, 50 Orang	100%	1.335 Orang	1.335 Orang	100
06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	0	181 Orang	181 Orang	100%	1.050 Orang	1.050 Orang	100%

06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%
06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	95 Orang	18 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	95 Orang	95 Orang	100%
06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	0	0	0	0%	50 Orang	50 Orang	100%

06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	9 Orang Gepeng	0	0	0%	10 Orang	10 Orang	100%
06	04	2.01	0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%

06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	100%
06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0	0	0	0%	15 Orang	15 Orang	0%
06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	0	12 Bulan	0	0	0%	0	0	0%

06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	180 Orang	186 KK, 20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, 1 kali razia, 150 Peserta ABH	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang	100%	180 Orang	180 Orang	100%
----	----	------	--	--	---	-----------	--	---	---	------	-----------	-----------	------

06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	180 Orang	186 KK	50 Orang	50 Orang	100%	180 Orang	180 Orang	100%
----	----	------	------	-----------------------	---	-----------	--------	----------	----------	------	-----------	-----------	------

06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%
06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	0	20 Orang PSK	0	0	0%	0	0	0%
06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%
06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten	0	0	50 Orang	50 Orang	100%	0	0	0%

					/ Kota								
06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	0	20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, Disabilitas 18	0	0	0%	0	0	0%
06	04	2.02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	0	1 Kali razia, 150 Peserta ABH	0	0	0%	0	0	0%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%	60%	60%	60%	100%	55%	55%	100%

06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM	100%	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	100%
06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	0	19 Orang, 114 Orang	0	0	0%	0	0	0%
06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	6.755.929 Keluarga	304 Desa 18 Kecamatan	324.480 Keluarga	324.480 Keluarga	100%	6.755.929 Keluarga	6.755.929 Keluarga	100%
06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	425.511 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	78.930 Keluarga	100%	425.511 Keluarga	425.511 Keluarga	100%

06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96 Orang	0	38.044 KPM	38.044 KPM	100%	96 Orang	96 Orang	100%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50%	60%	60%	60%	100%	50%	50%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9.433 Orang	12 Bulan, 12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%
06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	12 Bulan	371 Orang	371 Orang	100%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%

06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	9.433 Orang	0	0	0	0%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%
06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	0	12 Bulan	0	0	0%	0	0	0%
06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.433 Orang	0	0	0	0%	9.433 Orang	9.433 Orang	100%

06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%
06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	44 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	46 Orang	46 Orang	100%
06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	07	2.01		Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%

06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	0	6 Makam	6 Makam	100%	6 Makam	6 Makam	100%
----	----	------	------	---	---	---------	---	---------	---------	------	---------	---------	------

Sumber Data Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) kinerja lainnya dalam dokumen perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator sasaran Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tahun 2024 terealisasi sebesar 97,97% dan tingkat capaian sebesar 107,66.

Faktor keberhasilan yaitu:

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran;
- ✓ Pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan anggaran kas;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Pilar-pilar Sosial, dan Instansi terkait.

Faktor kegagalan:

- ✓ Pemahaman dan tingkat keaktifan Operator Desa terhadap DTKS masih kurang;
- ✓ DTKS yang belum valid, sehingga berdampak pada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial, tetapi belum tercover.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Sosialisasi tata cara pengusulan dan verval DTKS kepada Operator Desa;
- ✓ Updating data per bulan;
- ✓ Monitoring dan evaluasi.

Adapun kinerja lainnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
 - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. Indeks Profesionalitas ASN.

Tahun 2024 rata-rata capaian terealisasi sebesar 98,67.

Faktor keberhasilan adalah:

- ✓ Bukti dukung yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan Instansi terkait.

Faktor Kegagalan:

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Sisa pengadaan dan gaji;
- ✓ Banyak pegawai yang pensiun, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran dan kinerja;
- ✓ Banyak pegawai yang tidak mengikuti diklat dan pelatihan.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Melakukan reviu dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 yang memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran sesuai perubahan Pokin hasil Evaluasi SAKIP Dinas Sosial oleh Kemenpan;
- ✓ Pengisian/perekrutan PNS;
- ✓ Pengusulan untuk mengikuti diklat dan pelatihan.

2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan.

Tahun 2024 terealisasi sebanyak 3 dari 3 target dan tingkat capaian sebesar 100%.

Faktor keberhasilan adalah:

- ✓ Dokumentasi yang relevan;
- ✓ Keterlibatan ASN Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- ✓ Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebanyak 3 dan terealisasi 3.

Faktor Kegagalan:

- ✓ Perlu adanya SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 103,50%.

2.2. Review Terhadap Rancangan P-RKPD

Berdasarkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan rancangan Perangkat Daerah dilaksanakan

melalui mekanisme / tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3. (Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) berikut:

Tabel TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD								PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	HASIL ANALISI KEBUTUHAN							CATA TAN PENTI NG
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	LOKASI	INIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH REFOCUSING (Rp)	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)		LOKASI	INIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH REFOCUSING (Rp)	KEBUTUHAN DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81					Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Dinas Sosial	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81					
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10							Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10					
			Indeks Profesionalitas ASN	82							Indeks Profesionalitas ASN	82					

	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembanguan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3					Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembanguan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Dinas Sosial	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90 %	6.203.683.840	6.203.683.840	6.203.683.840	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90 %	6.203.683.840	5.446.607.390	5.446.607.390	(757.076.450)	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	20.000.000	18.300.000	18.300.000	(1.700.000)	
	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	9.025.000	9.025.000	(975.000)	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	10.000.000	9.275.000	9.275.000	(725.000)	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10 %	5.164.364.000	5.164.364.000	5.164.364.000	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	5.164.364.000	4.548.488.000	4.548.488.000	(615.876.000)	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.164.364.000	5.164.364.000	5.164.364.000	0	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.164.364.000	4.548.488.000	4.548.488.000	(615.876.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	IP ASN Perangkat Daerah	82	0	0	0	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	IP ASN Perangkat Daerah	82	0	0	0	0	
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	
	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	0	0	0	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	346.724.000	346.724.000	346.724.000	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	346.724.000	268.258.100	268.258.100	(78.465.900)	
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dan tepat waktu	12 Paket	145.724.000	145.724.000	145.724.000	0	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	145.724.000	96.493.200	96.493.200	(49.230.800)	
	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	19.906.900	19.906.900	(15.093.100)	
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	

	4. Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	66.000.000	66.000.000	66.000.000	0	4. Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDah	12 Lapora n	66.000.000	51.858.000	51.858.000	(14.142.000)	
	5. Penyediaa n Bahan/Mat erial		Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediaka n	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	5. Penyediaa n Bahan/Mat erial		Jumlah Paket Bahan/Mate rial yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Dinas Sosial	Persentas e Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Sesuai Kebutuha n	88%	347.595.840	347.595.840	347.595.840	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah sesuai Kebutuhan	88%	347.595.840	347.595.840	347.595.840	0	
	1. Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Lapor an	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	1. Penyediaa n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	

	2. Penyediaa n jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Lapor an	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	2. Penyediaa n jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Dinas Sosial	Persentas e Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	325.000.000	325.000.000	325.000.000	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	325.000.000	263.965.450	263.965.450	(61.034.550)	
	1. Penyediaa n Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	17 Unit	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	1. Penyediaa n Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	17 Unit	225.000.000	177.113.200	177.113.200	(47.886.800)	

	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	100.000.000	86.852.250	86.852.250	(13.147.750)	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dinas Sosial	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91%	8.762.345.306	8.762.345.306	8.762.345.306	0	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Dinas Sosial	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	91%	8.762.345.306	9.973.299.600	9.973.299.600	1.210.954.294	

2	PROGRAM PEMBERDAY AN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentas e PSKS yang mendapat kan pembinaa n dan aktif dalam penyelen ggaraan kesejahte raan sosial	75%	560.000.000	560.000.000	560.000.000	0	PROGRAM PEMBERDAY AN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PSKS yang mendapatk an pembinaa n dan aktif dalam penyelengg araan kesejahtera an sosial	75%	560.000.000	544.677.600	544.677.600	(15.322.400)	
	Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Dinas Sosial	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang , 18 Orang , 351 Lemb aga	560.000.000	560.000.000	560.000.000	0	Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Dinas Sosial	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	20 Orang, 18 Orang, 349 Lemba ga	560.000.000	544.677.600	544.677.600	(15.322.400)	
	1. Peningkata n Kemampu an Potensi Pekerja Sosial Masyaraka t Kewenang an Kabupaten /Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkat an Kapasitas Pekerja Sosial Masyaraka t Kewenang an Kabupaten /Kota	20 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1. Peningkata n Kemampua n Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenang an Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/ Kota	20 Orang	5.000.000	3.975.000	3.975.000	(1.025.000)	

	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	115.000.000	115.000.000	115.000.000	0	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	115.000.000	115.000.000	109.866.600	(5.133.400)	
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	
	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	351 Lembaga	440.000.000	440.000.000	440.000.000	0	4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	349 Lembaga	440.000.000	430.836.000	430.836.000	(9.164.000)	

3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%	6.410.755.006	6.410.755.006	6.410.755.006	0	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%	6.410.755.006	7.598.831.700	7.598.831.700	1.188.076.694	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	338.506 Keluarga, 60 Orang	6.410.755.006	6.410.755.006	6.410.755.006	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	7.181.440 Keluarga, 96 Orang	6.410.755.006	7.598.831.700	7.598.831.700	1.188.076.694	
	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	0	0	0	0	0	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	0	0	0	0	0	

	2. Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapat kan Pengentas an Fakir Miskin Kabupaten /Kota	215.00 0 Kelu ar ga	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	2. Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatka n Pengentasa n Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	6.755.9 29 Keluarg a	120.000.000	89.400.000	89.400.000	(30.600.000)	
	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahter aan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapat kan Bantuan Sosial Kesejahter aan Keluarga Kewenang an Kabupaten / Kota	123.35 6 Kelu ar ga	6.119.782.106	6.119.782.106	6.119.782.106	0	3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahter aan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga Kewenanga n Kabupaten / Kota	425.51 1 Keluarg a	6.119.782.106	7.341.801.150	7.341.801.150	(1.222.019.044)	
	4. Fasilitas Bantuan Pengemba ngan Ekonomi Masyaraka t		Jumlah Orang yang Mendapat kan Bantuan Pengemba ngan Ekonomi Masyaraka t Kewenang an Kabupaten / Kota	60 Orang	170.972.900	170.972.900	170.972.900	0	4. Fasilitas Bantuan Pengemba ngan Ekonomi Masyaraka t		Jumlah Orang yang Mendapatka n Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota	96 Orang	170.972.900	167.630.550	167.630.550	(3.342.350)	

4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	50%	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	50%	100.000.000	90.000.000	90.000.000	(10.000.000)	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.000 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	9.479 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	
	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	1. Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.433 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	

	2. Penyediaa n Sandang		Jumlah Orang yang Mendapat kan Pakaian dan Kelengkap an Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungs ian) dan Pasca Bencana Kewenang an Kabupaten / Kota	250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	2. Penyediaa n Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatka n Pakaian dan Kelengkapa n Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana Kewenanga n Kabupaten / Kota	9.433 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	3. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapat kan Layanan Dukungan Psikososia l Kewenang an Kabupaten / Kota	250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	3. Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial Kewenanga n Kabupaten/ Kota	9.433 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	Penyelengga	Dinas Sosial	Jumlah	40 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	Penyelenggar	Dinas Sosial	Jumlah	46 Orang	50.000.000	40.000.000	40.000.000	(10.000.000)	

	raan Pemberdayaa n Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/K ota		Tagana yang dibina						aan Pemberdayaa n Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/K ota		Tagana yang dibina						
	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana an Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksana kan Koordinasi , Sosialisasi dan Pelaksana an Taruna Siaga Bencana	40 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana an Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana	46 Orang	50.000.000	40.000.000	40.000.000	(10.000.000)	
5	PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentas e PPKS penerima manfaat Program Rehabilita si Sosial	50%	1.676.590.300	1.676.590.300	1.676.590.300	0	PROGRAM REHABILITA SI SOSIAL	Dinas Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitas i Sosial	50%	1.676.590.300	1.725.190.300	1.725.190.300	48.600.000	

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dins Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	1.526.590.300	1.526.590.300	1.526.590.300	0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.335 Orang	1.526.590.300	1.575.190.300	1.575.190.300	48.600.000	
	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	574.000.000	574.000.000	574.000.000	0	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.050 Orang	574.000.000	574.000.000	574.000.000	0	

	2. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	311.251.200	311.251.200	311.251.200	0	2. Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	311.251.200	311.251.200	311.251.200	0	
	3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	4. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	28.939.100	28.939.100	28.939.100	0	4. Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	28.939.100	28.939.100	28.939.100	0	
	5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	362.400.000	362.400.000	362.400.000	0	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	362.400.000	426.000.000	426.000.000	63.600.000	

	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten /Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
	10. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	10. Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang	225.000.000	210.000.000	210.000.000	(15.000.000)	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosia	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	186 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	180 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	

	1. Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	186 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	1. Penyediaan Permakanaan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	15.000.000	14.600.000	14.600.000	(400.000)	
	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	15.000.000	14.600.000	14.600.000	(400.000)	

	1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	1. Penyediaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam	15.000.000	14.600.000	14.600.000	(400.000)	
					14.966.029.146	14.966.029.146	14.966.029.146	0					14.966.029.146	15.419.906.990	15.419.906.990	453.877.844	

Sumber Data Dinas Sosial

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyangang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain:

- 1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
- 2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- 3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kabupaten.

Berikut ini usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024: (Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TABEL 2.4.
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan aplikasi SIPD Kabupaten Mojokerto dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp. 17.279.617.057,-** (Tujuh Belas Milyard Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp17.201.391.057,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.279.617.057,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp5.585.719.390,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.663.945.390,00	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp18.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.300.000,00	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.275.000,00	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp4.765.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.765.826.000,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.765.826.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.765.826.000,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp190.032.100,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp268.258.100,00	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.267.200,00	Rp78.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.493.200,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.906.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.906.900,00	
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.858.000,00	

1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp347.595.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.595.840,00	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.595.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.595.840,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp263.965.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.965.450,00	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp177.113.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.113.200,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp86.852.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.852.250,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp279.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp279.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000.000,00	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp115.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.000.000,00	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp159.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp1.545.927.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.545.927.967,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp1.380.927.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.927.967,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Pemakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp616.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp616.000.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.988.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.988.867,00	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp440.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.000.000,00	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	

1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.939.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.939.100,00	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp9.675.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.675.743.700,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp9.675.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.675.743.700,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.505.743.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.505.743.700,00	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	

10.	Dra. HEVI MAIDA LAILY, M.Si.	197005281994032003	ANGGOTA	
11.	YUNI LAILI FAIZAH, ST.	197706072001122005	ANGGOTA	

Sesuai periodisasi SPD

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah + Jumlah Inovasi, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan;
4. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan;
5. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Adapun uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ada pada Tabel 3.1. RKT di bawah ini.

Tabel 3.1.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasarn	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2025		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2025		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	9,37	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	92	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	65	279.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	72 Orang, 90 Lembaga	279.000.000	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	5.000.000
														2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	115.000.000
														3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 Lembaga	159.000.000
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55	9.675.743.700	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	222.430 Keluarga, 20 Orang	9.675.743.700	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	215.000 Keluarga	120.000.000
														2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	7.430 Keluarga	9.505.743.700
														3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan	20 Orang	50.000.000

															Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		
						Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50	105.000.000	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.000 Orang	85.000.000	1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	75.000.000
														2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	5.000.000
														3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang	5.000.000
										2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang	20.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang	20.000.000
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45	1.545.927.967	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.045 Orang	1.380.927.967	1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	820 Orang	616.000.000
														2. Penyedian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan	50 Orang	150.000.000

Tujuan			Kinerja Lainnya			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target 2025		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2025		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2025	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
			1. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	81,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90	5.663.945.390	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90	18.300.000	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9.025.000
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97									2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	9.275.000
				Indeks Profesionalitas ASN	82					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97	4.765.826.000	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	4.765.826.000
			2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	1					3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89	268.258.100	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	96.493.200
														2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
														3. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
														4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 ket	19.906.900
														5. Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	51.858.000
										4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	89	347.595.840	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	225.000.000

										Pemerintah n Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan				yang Disediakan			
															2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.595.840
										5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	263.965.450	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	177.113.200	
															2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	86.852.250

Sumber Data: Dinas Sosial

Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sesuai dengan SIPD ada pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2.
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025
 DENGAN PAGU SEMENTARA SEBAGAIMANA PADA APLIKASI SIPD
 KABUPATEN MOJOKERTO**

No	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan (Usulan Prioritas dan Cadangan)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2025 Dengan Pagu Sementara BAPPEDA							Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sebelum Perubahan	Setelah Refokusing	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial	81,05					APBD	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		97%						
			Indeks Profesionalitas ASN		82						
		Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Dinas Sosial	1						
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN RAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	Dinas Sosial	90%	5.663.945.390	5.663.945.390	5.663.945.390	0	APBD	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Dinas Sosial	90%	18.300.000	18.300.000	18.300.000	0	APBD	

		1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9.025.000	9.025.000	9.025.000	0		
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Laporan	9.275.000	9.275.000	9.275.000	0		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dinas Sosial	97%	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0	APBD	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/Bulan	4.765.826.000	4.765.826.000	4.765.826.000	0		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Dinas Sosial	82	0	0	0	0	APBD	
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		62 Paket	0	0	0	0		
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		0	0	0	0	0		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Dinas Sosial	89%	268.258.100	268.258.100	268.258.100	0	APBD	
		1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	96.493.200	96.493.200	96.493.200	0		
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	19.906.900	19.906.900	19.906.900	0		

		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	51.858.000	51.858.000	51.858.000	0		
		5. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Dinas Sosial	89%	347.595.840	347.595.840	347.595.840	0	APBD	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0		
		2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	122.595.840	122.595.840	122.595.840	0		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial	90%	263.965.450	263.965.450	263.965.450	0	APBD	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		17 Unit	225.000.000	177.113.200	177.113.200	0		

		Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	0	0	0		
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	86.852.250	86.852.250	86.852.250	0		
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	92 %	11.615.671.667	11.615.671.667	11.615.671.667	0	APBD	
2.		PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	65 %	279.000.000	279.000.000	279.000.000	0	APBD	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	Dinas Sosial	72 Orang, 90 Lembaga	279.000.000	279.000.000	279.000.000	0	APBD	
		1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		54 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		

		2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		18 Orang	115.000.000	115.000.000	115.000.000	0		
		3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota		90 Lembaga	159.000.000	159.000.000	159.000.000	0		
3.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	55 %	9.675.743.700	9.675.743.700	9.675.743.700	0	APBD	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dikelola	Dinas Sosial	222.430 Keluarga, 20 Orang	9.675.743.700	9.675.743.700	9.675.743.700	0	APBD	
		1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		215.000 Keluarga	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0		
		2. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan		7.430 Keluarga	9.505.743.700	9.505.743.700	9.505.743.700	0		

			Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota								
		3. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0		
4.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	Dinas Sosial	50 %	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	APBD	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1.000 Orang	85.000.000	85.000.000	85.000.000	0	APBD	
		1. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		500 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0		
		2. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota		250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
		3. Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan		250 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		

			Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota								
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang dibina	Dinas Sosial	46 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	APBD	
		1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		46 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0		
5.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	45 %	1.545.927.967	1.545.927.967	1.545.927.967	0	APBD	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Dinas Sosial	1.045 Orang	1.380.927.967	1.380.927.967	1.380.927.967	0	APBD	
		1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota		820 Orang	616.000.000	616.000.000	616.000.000	0		

		2. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Orang	120.988.867	120.988.867	120.988.867	0		
		3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
		4. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota		20 Orang	28.939.100	28.939.100	28.939.100	0		
		5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		

		6. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0		
		7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota		50 Orang	440.000.000	440.000.000	440.000.000	0		
		8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
		9. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota		15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
		10. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		

		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Dinas Sosial	188 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	APBD	
		1. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		188 Orang	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0		
6.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Dinas Sosial	100 %	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	APBD	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Dinas Sosial	6 Makam	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	APBD	
		1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota		6 Makam	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF :						17.279.617.057	17.279.617.057	17.279.617.057	0		

Sumber Data: Dinas Sosial

Sedangkan penggunaan anggaran pada Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sesuai dengan Rincian Sub Kegiatan (RSK) ada pada Tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3.
RSK P-APBD DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	6	06				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25,578,659,507	25,578,659,507.00					
	6	06	01	2.01	0001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5,600,803,140		81.10	DAU	DINAS SOSIAL		
								Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			96.15%				
								Indeks Profesionalitas ASN			81.05				
								Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			3				
	6	06	01	2.01		1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	11,950,000		90%	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	01	2.02	0001		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,950,000	Penyusunan Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rankhir Renja, Renja, Rancangan Perubahan, Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Perjakin APBD dan P-APBD	9 Dokumen	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		380,800						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (kertas HVS 10 rim x 68.100)		681,000						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (jilid 3 buku x 6.700) (photo copy 751 lembar x 400)		320,500						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (tinta printer 1 botol x Rp 167.700)		167,700						
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa		0						
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44orang x Rp 100.000		4,400,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	01	2.02	0007		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,000,000	Penyusunan Laporan SPM, LPPD, LKJIP, LKPJ, AKSARA, SAKIP, Satu Data Palapa, SPIP, KKS, SDG's.	10 Laporan	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Karbon		250						
								Buku Kwitansi 10 buku x 13.350		133,500						
								Ordner Besar 1 buah x 37.750		37,750						
								Snel Jepit 5 buah x 15.800		79,000						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover(kertas HVS 12 rim x 68.100)		817,200						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (jilid 4 buku x 6.700) (photo copy 506 lembar x 400)		229,200						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (tinta printer 3 botol x Rp 167.700)		503,100						
								Belanja Perjalanan Dinas Biasa		0						
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42 orang x Rp 100.000		4,200,000						
	6	06	01	2.02		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	4,765,826,000		96.15%	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	01	2.02	0001		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,765,826,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Belanja Gaji Pokok PNS (1 Tahun)		1,869,149,000						
								Belanja Gaji Pokok PPPK (1 Tahun)		64,072,000						
								Belanja Tunjangan Keluarga PNS (1 Tahun)		174,739,000						
								Belanja Tunjangan Keluarga PPPK (1 Tahun)		8,971,000						
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS (1 Tahun)		119,902,000						
								Belanja Tunjangan Fungsional PNS (1 Tahun)		90,951,000						
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (1 Tahun)		32,414,000						
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK (1 Tahun)		3,700,000						
								Belanja Tunjangan Beras PNS (1 Tahun)		87,345,000						
								Belanja Tunjangan Beras PPPK (1 Tahun)		5,794,000						
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (1 Tahun)		10,029,000						
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK (1 Tahun)		1,000,000						
								Belanja Pembulatan Gaji PNS (1 Tahun)		171,000						
								Belanja Pembulatan Gaji PPPK (1 Tahun)		50,000						
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (1		4,486,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Tahun)								
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK (1 Tahun)		154,000						
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (1 Tahun)		13,458,000						
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK (1 Tahun)		462,000						
								Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (1 Tahun)		9,346,000						
								Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK (1 Tahun)		321,000						
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (1 Tahun)		2,171,080,000						
								Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)		13,080,000						
								Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ppk Skpd) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)		15,000,000						
								Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12 Bulan)		5,232,000						
								Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (2 Orang/ 24 Bulan)		22,500,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M... (12 Bulan)		36,120,000						
								Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12bulan)		6,300,000						
	6	06	01	2.06		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	234,065,700		90%	PAD	DINAS SOSIAL		
	6	06	01	2.06	0002		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78,998,200	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Radiator Genset Spesifikasi : 350 kva Cummins NTA855-G2 (1 Buah X 16.872.000)		16,872,000						
								Flash Disk Spesifikasi : 32 GB (3 Buah X 200.100)		600,300						
								Hand Sprayer Spesifikasi : Elektrik (1 Unit X 1.078.000)		1,078,000						
								Lemari Arsip Spesifikasi : Besi, Kaca (1 Unit X 5.661.000,00)		5,661,000						
								Vacuum Cleaner Spesifikasi : Kapasitas : 6Liter, Daya : 120Watt, Voltase : 220/5V/Hz, Tingkat Kebisingan : 75 Db (1 Buah X 5.328.000,00)		5,328,000						
								Ac Split Spesifikasi : 1 pk (1 Unit X 6.103.900,00)		6,103,900						
								Kompore Gas Spesifikasi : 2								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Tungku (2 Unit X 599.400,00)		1,198,800						
								Tablet Spesifikasi : 128 Gb/6Gb, Octa-Core (2 Unit X 7.454.900,00)		14,909,800						
								Tensimeter Manual Spesifikasi : - (2 Buah X 527.700,00)		1,055,400						
								Laptop Spesifikasi : Administrasi (2 Unit X 13.095.500)		26,191,000						
	6	06	01	2.06	0004		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50,000,000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 20.000)		20,000,000						
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 30.000)		30,000,000						
	6	06	01	2.06	0005		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	19,900,400	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Amplop Spesifikasi : Dengan Kop (353 Lembar, 1 Lembar x Rp. 3.900)		1,376,700						
								Map Dinas (500 Buah, 1 Buah x Rp. 7.800)		3,900,000						
								Kertas Kop Spesifikasi : A4/F4/Quarto (10 Rim, 1 Rim x Rp. 233.100)		2,331,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas Hvs 70 Gsm Uk1/2 Folio Cetak 1 Muka Isi 100... (4 Rim, 1 Rim x Rp. 41.650)		166,600						
								Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs Rp. 16.844 Lembar (1 Lembar x Rp. 400)		6,737,600						
								Banner Spesifikasi: fronlite 340 gr (6M2 x 10 lembar x 352.350)		3,141,000						
								Tarif Surat kabar (12 bulan x 187.100.		2,245,200						
								Pembulatan		2,300						
	6	06	01	2.06	0007		4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	41,076,100	Tersedianya Bahan/Material	12 Paket	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Amplop Putih Spesifikasi : Uk 114x160mm 20 dos x 27.750		555,000						
								Amplop Putih Spesifikasi : Uk 95x150mm 20 dos x 26.650		533,000						
								Tinta Stempel 50 Cc 14 Botol x 18.500.		259,000						
								Ordner Besar 23 Buah x 37.750		868,250						
								Ballpoint Tanda Tangan 20 Buah x 54.400.		1,088,000						
								Binder Clip Sedang 30 Pak x 15.550		466,500						
								Binder Clip Besar 21 Pak x 49.400.		1,037,400						
								Buku Agenda Besar 10 Buah x 92,600		926,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Buku Kwitansi Besar 50 Buku x 13.350		667,500						
								Buku Tulis isi 38 lembar 15 buah x 5000		75,000						
								Isi Staples kecil 50 pak x 7800		390,000						
								Isi Staples Sedang 35 pak x 37.550		1,314,250						
								Karbon		6,250						
								Map Bufalo 72 Buah x 7.250		522,000						
								Pensil Tulis 21 Buah x 5.850		122,850						
								Snelhektek Jepit Folder One Map Jepit (Clip File) 54 Biji x 15.800		853,200						
								Spidol Besar 20 Buah x 16.650		333,000						
								Tipe-X/ Correction Cair 6 Buah x 7.800		46,800						
								Materai 10000 30 Lembar x 14.400		432,000						
								Kertas HVS Folio/F4 70Gram 200 Rim x 68.100		13,620,000						
								Tinta Printer Tinta Cair 70 Ml 100 Botol x 167.700		16,770,000						
								Tinta Printer Toner Hitam, 500 Gram 1 Per Bungkus x 190.100		190,100						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	01	2.06	0009		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,091,000	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta (6 Orang/Kali X 256.000)		1,536,000						
								Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN (3 Orang / PP X 3.000.000)		9,000,000						
								Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA (6 Orang / Hari X 530.000)		3,180,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Golongan II/I (6 Orang / Hari X 275.000)		1,650,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil (4 Orang / Hari X 250.000)		1,000,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (7 Orang / Hari X 400.000)		2,800,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya (5 Orang / Hari X 375.000)		1,875,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama (14 Orang / Hari X 325.000)		4,550,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (185 Orang / Hari X 100.000)		18,500,000						
	6	06	01	2.08		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	347,595,840		90%	PAD	DINAS SOSIAL		
	6	06	01	2.08	0002		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	225,000,000	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Tarif Air PDAM Spesifikasi : Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota/Provin... (1581 M3, 1 M3 x 8.571,42)		13,912,800						
								Tarif Listrik Prabayar 5501 s.d 53000 Spesifikasi : Golongan Tarif P-1 (113913Kwh, 1 Kwh x 1467)		167,110,371						
								Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif Spesifikasi : 100 Mbps (12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 1.144.700)		13,736,400						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Miliar Sd. Rp. 10 Mi... (12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 2.520.000)		30,240,000						
								<i>Pembulatan</i>		429						
	6	06	01	2.08	0004		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	122,595,840	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	PAD	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Spesifikasi : Umum Dinsos (6 orang x 10 bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040)		76,622,400						
								Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Umum Dinsos (4 orang x 2 bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040)		10,216,320						
								Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Dinsos (2 Orang/12Bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040)		30,648,960						
								Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Dinsos (2 Orang/2Bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040)		5,108,160						
	6	06	01	2.09		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	241,365,600		90%	PAD	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	01	2.09	0002		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161,689,800	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos)	PAD	DINAS SOSIAL		
								Bensin Spesifikasi : Non Subsidi (4502 Liter X 16.050)		72,257,100						
								Oli Spesifikasi : Mobil (33 Liter X 238.000)		7,854,000						
								Solar Spesifikasi : Non Subsidi 444 Liter X 25.750,00		11,433,000						
								Ban Luar Mobil Spesifikasi : Ring 14 (3 Buah X 783.800,)		2,351,400						
								Ban Luar Mobil Spesifikasi : Ring 16 (2 Buah X1.511.700,00)		3,023,400						
								Ban Luar Motor Spesifikasi : Ring 17 (6 Buah X 300.100)		1,800,600						
								Kampas Kopling Mobil Spesifikasi : Kampas Kopling Mobil Type Mpv (2 Set x 3.471.200)		6,942,400						
								Kampas Rem Depan Mobil Spesifikasi : Kampas Rem Depan Mobil Type Mpv (1 Set X 2.127.500)		2,127,500						
								Karbon Spesifikasi : Pembulatan (200 Lembar X 1,00)		200						
								Accu Spesifikasi : SUV (4 Buah X 1.652.600,00)		6,610,400						
								Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 16 (1 Tahun X 2.538.000)		2,538,000						
								Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 2 (1 Tahun X 320.600)		320,600						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 6 (1 Tahun X 1.202.200)		1,202,200						
								Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kategori 7 (5 Tahun X 1.335.800,00)		6,679,000						
								Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Operasional dalam lingkungan kantor (3 Unit / Tahun X 9.750.000,00)		29,250,000						
								Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (2 Unit/Tahun X 3.650.000,00)		7,300,000						
	6	06	01	2.09	0010		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	79,675,800	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	PAD	DINAS SOSIAL		
								Cat Tembok Spesifikasi : Sekualitas paragon, water base (75 Kg x 80.550)		6,041,250						
								Kuas Cat Spesifikasi : Uk. 4 Inch (5 Buah X Buah /18.150)		90,750						
								Minyak cat/tiner B Spesifikasi : - (8 Liter x Liter /32.250)		258,000						
								Detergen Spesifikasi : Sedang (80 Per Bungkus x 56.050)		4,484,000						
								pembersih Kaca Spesifikasi : isi 440 ml (32 Botol x13.900)		444,800						
								Shampoo Spesifikasi: Kecil (79 botol x 33.900)		2,678,100						
								Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : - (80 Per Bungkus X 41.000,00)		3,280,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Karbon Spesifikasi : Pembulatan (100 Lembar X Lembar/1,00)		100						
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Spesifikasi : - (50 Buah x Buah/26.100)		1,305,000						
								Kain Pel Spesifikasi : Biru (25 Buah x Buah/41.650)		1,041,250						
								Keset Spesifikasi : Kain (22 Buah X 51.650)		1,136,300						
								Pasta Gigi Spesifikasi : Sedang (90 Pcs X 26.650)		2,398,500						
								Pembersih Lantai Spesifikasi : Sedang (61 Pcs x 29.150)		1,778,150						
								Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi : Bahan/Alat Kebersihan(22 Botol X 93.800)		2,063,600						
								Sabun Batangan Spesifikasi : 80 Gram (105 Buah x 4.900)		514,500						
								Sabun Cair Spesifikasi : Sedang (88 Botol x 40.550)		3,568,400						
								Sapu Ijuk Spesifikasi : Dalam Ruangan (12 Buah X 59.800)		717,600						
								Sapu Lidi Spesifikasi : Luar Ruangan (10 Buah X 52.750)		527,500						
								Sikat Spesifikasi : Gigi (45 Buah X 39.700)		1,786,500						
								Tempat Sampah Spesifikasi : Ruangan (14 Buah X 77.500)		1,085,000						
								Lampu Bolam LED Spesifikasi : 14 Watt (50 Buah X 94.950)		4,747,500						
								Tukang Spesifikasi : Lokal, WNI, Per Hari 7 Jam Kerja (Tukang biasa/ batu/ batu halus/ batu kasar) (30 Orang / Hari X160.300)		4,809,000						
								Biaya Pemeliharaan Sarana								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Kantor Spesifikasi : Ac Spliit (20 Unit / Tahun X 610.000)		12,200,000						
								Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook (16 Unit / Tahun X 730.000)		11,680,000						
								Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer (16 Unit / Tahun X 690.000)		11,040,000						
	6	06	02			Program Pemberdayaan Sosial			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	262,275,000		65%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF
	6	06	02	2.03		1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	117,275,000		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	02	02.03	0001			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	4,075,000		54 orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr 4 M2 (1M2 x Rp. 52.350,00)		209,400						
								Photo Copy 164 Lembar (1 Lembar x Rp. 400)		65,600						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Biaya Konsumsi (Makan) 60 Kotak (1 Kotak x Rp. 30.000)		1,800,000						
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 60 Kotak (1 Kotak x Rp. 20.000)		1,200,000						
								Uang harian Spesifikasi : Bantuan Transport Peserta 8 Orang/Kali (1 Orang/Kali x Rp. 100.000)		800,000						
	6	06	02	02.03	0002			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKK kewenangan kab/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	113,200,000		18 orang				
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr 4 M2 (1M2 x Rp. 52.350,00)		209,400						
								Karbon Spesifikasi : pembulatan		200						
								Photo Copy 226 Lembar (1 Lembar x Rp. 400)		90,400						
								Biaya Konsumsi (Makan) 30 Kotak (1 Kotak x Rp. 30.000)		900,000						
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 30 Kotak (1 Kotak x Rp. 20.000)		600,000						
								Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ... 1 Orang/Jam/Pelajaran (1 Orang x Rp. 1.400.000)		1,400,000						
								Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (Intern		500,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Perang... 2 Orang/Jam/Pelajaran (1 Orang/Jam/Pelajaran x Rp. 500.000)								
								honor TKSK Spesifikasi : 216 OB x 500,000		108,000,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum Golongan IV/I... 1 Orang/Hari (1 Orang/Hari x Rp. 350.000)		350,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...2 Orang/Hari (1 Orang/Hari x Rp. 375.0000)		750,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b 1 Orang/Hari (1 Orang/Hari x Rp. 400.000)		400,000						
	6	06	02			Program Pemberdayaan Sosial			Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	145,000,000		65%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF
	6	06	02	2.03		1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	145,000,000		%	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	02	2.03	0004			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	145,000,000						
								Rincian:								
								Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina (50 Liter X 18.900)		945,000						
								Ballpoint Spesifikasi : Tulis (90 Buah X 7.150)		643,500						
								Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar (90 Buah X 7.150)		643,500						
								Map Spesifikasi : Map Plastik Zipper (90 Buah X 17.250)		1,552,500						
								Ballpoint Spesifikasi : Tulis (90 Buah X 7.150)		643,500						
								Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar (90 Buah X 7.150)		643,500						
								Map Spesifikasi : Map Plastik Zipper (90 Buah X 17.250)		1,552,500						
								Amplop Putih Spesifikasi : Uk 95x150mm (3 Dos X 26.650)		79,950						
								Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar(50 Buku X 13.350)		667,500						
								Isi Staples Spesifikasi : Kecil (10 Pak X 7.800)		78,000						
								Karbon Spesifikasi : Pembulatan (150 Lembar X 1,00)		150						
								Map Spesifikasi : Bufalo (40 Buah X 7.250,00)		290,000						
								Paper Clips Spesifikasi : Kecil (5 Pak X 6.150,00)		30,750						
								Snelhekteer Plastik Spesifikasi : Inter X (50 Buah X 8.000,00)		400,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Kertas HVS Spesifikasi : Folio/F4 70Gram (20 Rim X 68.100,00)		1,362,000						
								Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs (968 Lembar X 400,00)		387,200						
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr (9 M2 X 52.350,00)		471,150						
								Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr 9 M2 X 52.350,00		471,150						
								Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 MI (5 Botol X 167.700)		838,500						
								Biaya Konsumsi (Prasmanan) Spesifikasi : Untuk Hotel (100 Per Orang X 210.000,00)		21,000,000						
								Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 MI (5 Dos X 87.750,00)		438,750						
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : - (100 Kotak X 20.000,00)		2,000,000						
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : - (100 Kotak X 30.000,00)		3,000,000						
								Moderator Spesifikasi : - (1 Orang / Kegiatan X 700.000,00)		700,000						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan (1 Orang / Jam / Pelajaran X 1.400.000,00)		1,400,000						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern		1,000,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Perangkat Daerah) (2 Orang / Jam / Pelajaran X 500.000,00)								
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan (4 Orang / Jam / Pelajaran X 800.000,00)		3,200,000						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pembawa Acara (1 Orang / Kegiatan X 400.000,00)		400,000						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) (2 Orang / Jam / Pelajaran X 500.000,00)		1,000,000						
								Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan (4 Orang / Jam / Pelajaran X 800.000,00)		3,200,000						
								Jasa Juri Spesifikasi : Perlombaan Kategori Umum ; Non Seni / Olahraga ; Tk.Kabupaten / Kota (3 Kegiatan X 1.500.000,00)		4,500,000						
								Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta (5 Orang / Bulan X 1.210.000,00)		6,050,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda (3 Orang / Hari X 350.000,00)		1,050,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi		325,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama (1 Orang / Hari X 325.000,00)								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya (1 Orang / Hari X 375.000,00)		375,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (1 Orang / Hari X 400.000,00)		400,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum NoPegawai Negeri Sipil (1 Orang / Hari X 250.000,00)		250,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (48 Orang / HariX 100.000,00)		4,800,000						
								Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta (90 Orang / Kali X 100.000,00)		9,000,000						
								Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Kelompok/Regu ; Umum ; Non Seni/Olahraga (1 Kali X 5.000.000,00)		5,000,000						
								Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Kelompok/Regu ; Umum ; Non Seni/Olahraga (1 Kali X 4.500.000,00)		4,500,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Kelompok/Regu ; Umum ; Non Seni/Olahraga (1 KaliX 4.000.000,00)		4,000,000						
								Penerima Bantuan Sosial : LKS Eks Napza "Baitu Husodo" Bentuk Bantuan Sosial : Mesin jahit Spesifikasi : jarum satu highspeed (3 UnitX 3.885.000,00)		12,937,050						
								Penerima Bantuan Sosial : Karang Taruna "TRISULA" Bentuk Bantuan Sosial : Mesin sangrai kopi Spesifikasi : Mesin Sangrai Kopi KOHPAD CR 3 (1 Unit X 23.000.000,00)		25,530,000						
								Penerima Bantuan Sosial : Karang Taruna "TRISULA" Bentuk Bantuan Sosial : Mesin kopi espresso Spesifikasi : semi profesional EC9155.MB (1 Unit X 15.535.000,00)		17,243,850						
	6	06	04			Program Rehabilitasi Sosial			Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	1,525,137,467		45%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS
	6	06	04	2.01		1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1,358,137,467		%	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	04	2.01	0001		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	616,000,000	Permakanan Lansia 50 Org (566.300.000), Anak LKSA Beras 133.700.000	750 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Pengisin Tabung Gas 3 kg 420 Tabung x Rp 39.000,-		16,380,000						
								Photo Copy 703Lembar x Rp. 400,-		281,200						
								Air Mineral 360 Galon x Rp.25.650,-		9,234,000						
								Bawang Putih 120 Kg x Rp. 45.300,-		5,436,000						
								Bayam 72 Ikot x Rp. 4.200,-		302,400						
								Beras 4.200 Kg x Rp. 19.100,-		80,220,000						
								Bihun Jagung 24Kg x Rp. 33.400		801,600						
								Cabe Iji Ale 36 Bungkus x Rp. 7.200,-		259,200						
								Cabe Kecil 48 Kg x Rp. 71.400		3,427,200						
								Daging Ayam 180 x Rp. 50.100		9,018,000						
								Daging Sapi 240 x Rp. 198.500,-		47,640,000						
								Daun Brambang 12 Kg x Rp. 50.800,-		609,600						
								Daun Kemangi 36 Ikot x Rp.								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								6.800		244,800						
								Daun Pisang 72 Ikat x Rp. 33.100,-		2,383,200						
								Daun Prei 6 Kg x Rp. 41.750,-		250,500						
								Daun Sledri 12 Kg x Rp. 35.800,-		429,600						
								Gambas 120 Kg x Rp. 33.100,-		3,972,000						
								Garam Halus 120 Bungkus x Rp. 5.950,-		714,000						
								Gobis 96 Kg x Rp. 17.900,-		1,718,400						
								Gula Pasir 898 Kg x Rp. 17.350,-		15,580,300						
								Ikan Air Tawar 240 Kg x Rp. 53.650,-		12,876,000						
								Jagung Dadaran 240 Kg x Rp. 15.450,-		3,708,000						
								Jahe 12 Kg x Rp. 25.050,-		300,600						
								Agar agar 120 Sch x Rp. 7,050.-		846,000						
								Kecap 95 Botol x Rp. 26.550,-		2,522,250						
								Kelapa Parut 120 Butir x Rp. 19.700,-		2,364,000						
								Kemiri 27 Kg x Rp. 77.500.-		5,580,000						
								Kencur 6 Kg x Rp. 41.750,-		250,500						
								Kentang 180 Kg x Rp. 26.250,-		4,725,000						
								Ketumbar 6 Kg x Rp. 33.400,-		200,400						
								Kopi Hitam Arabika 36 Kg x Rp. 136.400,-		4,910,400						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Krai 72 Kg x Rp. 14.350,-		1,033,200						
								Kunir 6 Kg x Rp. 61.950,-		371,700						
								Lombok Merah 72 Kg x Rp. 50.700,-		3,650,400						
								Manisa 180 Kg x Rp. 14.350,-		2,583,000						
								Mentimun 60 Kg x Rp. 20.450,-		1,227,000						
								Merica 6 Kg x Rp. 171.300,-		1,027,800						
								Mie Telor 24 Dos x Rp. 107.300,-		2,575,200						
								Minyak Goreng 2 Ltr 720 Pcs x Rp. 56.400,-		40,608,000						
								Pepaya 456 Kg x Rp. 17.900,-		8,162,400						
								Sawi Hijau 180 Ikata x Rp. 3.150,-		567,000						
								Sawi Putih 180 Ikata x Rp. 13.800,-		2,484,000						
								Snack 348 Per Kotak x Rp. 91.250,-		31,755,000						
								Susu Kental Manis 720 Kaleng x Rp. 14.000,-		10,080,000						
								Tahu 7.200 Biji x Rp. 4.800,-		34,560,000						
								Tauge Pendek 12 Kg x Rp. 52.950,-		635,400						
								Tauge Panjang 12 Kg x Rp. 37.600,-		451,200						
								Teh Celup 72 Kotak x Rp. 13.150,-		946,800						
								Telur Ayam 120 Kg x Rp. 36.150,-		4,338,000						
								Tempe 1.800 Kotak x Rp. 8.350,-		15,030,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Bawang Merah 240 Kg x Rp. 53.650,-		12,876,000						
								Tepung Terigu 12 Kg x Rp. 20.300,-		243,600						
								Terasi Udang 30 Sachet x Rp. 12.250,-		367,500						
								Terong 84 Kg x Rp. 14.350,-		1,205,400						
								Tomat 60 Kg x Rp. 28.650,-		1,719,000						
								Tongkol Pindang 60 Kg x Rp. 127.600,-		7,656,000						
								Udang 180 Kg x Rp. 101.400,-		18,252,000						
								Wortel 60 Kg x Rp. 21.500,-		1,290,000						
								Pisang Raja 360 Kg x Rp. 41.750,-		15,030,000						
								Buncis 60 Kg x Rp. 22.650,-		1,359,000						
								Honorarium Pengelola Keuangan (PPTK) 6 Bulan x R.p1.610.000,-		9,660,000						
								Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat beras 750 anak x 10 Kg x Rp. 19.100,-		147,070,000						
								pembulatan		250						
	6	06	04	2.01	0002		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	146,038,300	Penyediaan sandang bagi penghuni UPT	50 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Rincian :								
								Kertas 5 rim x Rp. 68.100,-		340,500						
								Tinta 4 Botol x Rp. 167.700		670,800						
								Masker 12 Box x Rp. 29.600,-		355,200						
								Underpad 40 Pak x Rp. 49.950,-		1,998,000						
								Hand Scoon 60 Box x Rp. 73.300		4,398,000						
								Perlengkapan Jenazah 16 Set x Rp. 295.300		4,724,800						
								Popok Dewasa 710 Pack x Rp. 188.100,-		133,551,000						
	6	06	04	2.01	0003		3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	120,988,867	Pemberian alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas	53 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Buku Kwitansi 36 buku x 13.350		480,600						
								Snel Plastik 33 buah x 8.000		264,000						
								Kertas 7 rim x Rp. 68.100,-		476,700						
								Photo Copy 326 Lembar x Rp. 400		130,400						
								Banner 4 M/2 x Rp 52.350		209,400						
								Tinta 6 Botol x Rp. 167.700		1,006,200						
								Uang Harian Pertemuan Di		4,500,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Luar Kantor - Dalam Kota 45 Orang x Rp. 100.000								
								Belanja Bantuan Sosial Barang		113,921,500						
								<i>Pembulatan</i>		<i>67</i>						
	6	06	04	2.01	0004		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	Mempertemukan kembali keluarga yang hilang	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000		750,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000		650,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang Non ASN x Rp. 250.000		500,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 31 Orang x Rp. 100.000		3,100,000						
	6	6	4	02.01	5		5	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	432,748,000	Terlaksananya pemberian honorarium bagi THL di UPT PPKS Majapahit	50 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Pengisian Bahan Bakar (BBM)								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								510 Liter x Rp. 18.900		9,639,000						
								Foto Copy 579 Lembar x Rp. 400		231,600						
								Jasa Tenaga Medis 5 Orang x 2 Bulan x Rp. 1.500.000		15,000,000						
								Jasa Tenaga Perawat Klien 5 Orang x 2 Bulan x Rp. 1.500.000		15,000,000						
								Jasa Tenaga Pembantu Perawat 4 Orang x 10 Bulan x Rp. 1.500.000		60,000,000						
								Jasa Tenaga Pembantu Pengasuh Klien 5 Orang x 10 Bulan x Rp. 1.500.000		75,000,000						
								Jasa Tenaga Pembantu Psikolog 1 Orang x 10 Bulan x Rp. 1.000.000		10,000,000						
								Jasa Tenaga Kebersihan 3 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000		54,000,000						
								Jasa Tenaga Keamanan 4 Orang x 2 Bulan x 1.500.000		12,000,000						
								Jasa Tenaga Juru Masak 3 Orang x 12 Bulan x 1.500.000		54,000,000						
								Jasa Tenaga Supir 1 Orang x 12 Bulan x 1,500.000		18,000,000						
								Jasa Tenaga Administrasi 2 Orang x 2 Bulan x Rp. 1.277.040		5,108,160						
								Jasa Tenaga Pembantu Administrasi 2 Orang x 10 Bulan x Rp. 1.200.000		24,000,000						
								Jasa Tenaga Pembantu Administrasi (keamanan) 4 Orang x 10 Bulan x Rp. 1.500.000		60,000,000						
								Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana Umum (Tukang) 30		4,809,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								orang / hari x Rp. 160.300								
								Jasa Tenaga Penceramah Agama 1 Orang x 12 Bulan x Rp. 500.000,-		6,000,000						
								Uang Harian Pertemuan (fulday/halfday) 15 Orang/ hari x Rp. 100.000,-		1,500,000						
								Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6 Bulan x 1.410.000		8,460,000						
								<i>Pembulatan</i>		240						
	6	06	04	2.01	0006		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	2,988,000	Terlaksananya assesment bagi PPKS	10 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Map 8 buah x 7.250		58,000						
								Kertas 6 rim x Rp. 68.100,-		408,600						
								Photo Copy 15 Lembar x Rp. 400		6,000						
								Tinta 3 Botol x Rp. 167.700		503,100						
								Minyak Goreng 5 Liter x Rp 56.400		282,000						
								Mie Instan Goreng 5 Dos x Rp		775,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								155.000								
								Beras Premium 50 Kg x Rp 19.100		955,000						
								<i>Pembulatan</i>		<i>300</i>						
	6	06	04	2.01	0008		7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	3,000,000	Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Buku Kwitansi 10 buku x 13.350		133,500						
								Snel Plastik 20 buah x 8.000		160,000						
								Kertas 2 rim x Rp. 68.100,-		136,200						
								Photo Copy 6 Lembar x Rp. 400		2,400						
								Tinta 1 Botol x Rp. 167.700		167,700						
								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 24 Orang x Rp. 100.000		2,400,000						
								<i>Pembulatan</i>		<i>200</i>						
	6	06	04	2.01	0009		8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Buku Kwitansi 12 buku x 13.350		160,200						
								Map 10 buah x 7.250		72,500						
								Snel Plastik 10 buah x 8.000		80,000						
								Kertas 3 rim x Rp. 68.100,-		204,300						
								Photo Copy 119 Lembar x Rp. 400		47,600						
								Tinta 2 Botol x Rp. 167.700		335,400						
								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 41 Orang x Rp. 100.000		4,100,000						
	6	06	04	2.01	0010		9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota	26,374,300	Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS	20 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Bahan Bakar Pertamina 500 Liter x 18.900		9,450,000						
								Buku Kwitansi 41 buku x 13.350		547,350						
								Map 36 buah x 7.250		261,000						
								Snel Plastik 40 buah x 8.000		320,000						
								Kertas 6 rim x Rp. 68.100,-		408,600						
								Photo Copy 247 Lembar x Rp. 400		98,800						
								Tinta 5 Botol x Rp. 167.700		838,500						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 5 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000		1,875,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 5 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000		1,625,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 5 Orang Non ASN x Rp. 250.000		1,250,000						
								Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 97 Orang x Rp. 100.000		9,700,000						
								<i>Pembulatan</i>		50						
	6	06	04	2.02		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	167,000,000		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	04	2.02	0003		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	164,000,000	Terwujudnya pemberian bantuan permakanan bagi penderita eks kusta di Sumber Glagah	196 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Buku kwitansi 40 buku x 13.350		534,000						
								Map 44 buah x 7.250		319,000						
								paper clips 10 pak x 6.150		61,500						
								snel plastik 50 buah x 8.000		400,000						
								kertas HVS 8 rim x 68.100		544,800						
								Banner 4 M/2 x Rp 52.350		209,400						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Photo Copy 408 Lembar x Rp. 400		163,200						
								Tinta printer 9 botol x 167.700		1,509,300						
								Honor PPTK 6 OB x 1.210.000		7,260,000						
								Belanja Bantuan Sosial Barang		149,498,500						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 35 Orang x Rp. 100.000		3,500,000						
								Pembulatan		300						
	6	06	04	2.02	0009		2	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota	3,000,000	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Buku Kwitansi 9 buku x 13.350		120,150						
								Snel Plastik 13 buah x 8.000		104,000						
								Kertas HVS 2 rim x 68.100		136,200						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Photocopy 10 lbr x 400		4,000						
								Tinta printer 2 botol x 167.700		335,400						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 23 Orang x Rp. 100.000		2,300,000						
								<i>Pembulatan</i>		250						
	6	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase Desa yang updating SIKS-NG	18,087,484,400		55%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING
	6	06	05	2.02		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	18,040,704,400		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	05	2.02	0002		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	88,087,000	Pendataan PPKS-PSKS dan DTKS	215.000 Keluarga	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								DTKS								
								Kwitansi 10 buku x Rp 13.350		133,500						
								Isi Staples Kecil 5 pak x Rp 7.800		39,000						
								Map 20 buah x Rp 7.250		145,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Snelhecter plastik 24 buah x 8.000		192,000						
								Amplop Putih 1 dus x Rp 26.650		26,650						
								Karbon 110 lembar x Rp 1		110						
								Kertas HVS 20 rim x Rp 75.600		1,512,000						
								Foto Copy 1000 lembar x Rp 400		400,000						
								Tinta Printer (Cair) 70ml 12 botol x Rp 167.700		2,012,400						
								Snack Mamin 60 Kotak x Rp. 50.000		3,000,000						
								Honorarium Tenaga Administrasi Umum 36 O/B x Rp 1.277.040		45,973,440						
								Honorarium PPTK 12 O/B x Rp. 1.210.000		14,520,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 2 O/H x Rp. 250.000		500,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Fungsional Umum Gol. III 2 O/H x Rp 325.000		650,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 2 O/H x Rp. 400.000		800,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 2 O/H x Rp. 375.000		750,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 2 O/H x Rp. 350.000		700,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 20 Orang x Rp. 100.000		2,000,000						
								Uang Harian - Bantuan								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Transport 20 Orang x Rp. 100.000		2,000,000						
								PPKS								
								Kwitansi 6 buku x Rp 13.350		80,100						
								Isi Staples Kecil 2 pak x Rp 7.800		15,600						
								Map 20 buah x Rp 7.250		145,000						
								Snelhecter plastik 24 buah x 8.000		192,000						
								Karbon 200 lembar x Rp 1		200						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 10 O/H x Rp. 250.000		2,500,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Fungsional Umum Gol. III 10 O/H x Rp 325.000		3,250,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 2 O/H x Rp. 400.000		800,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 10 O/H x Rp. 375.000		3,750,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 20 Orang x Rp. 100.000		2,000,000						
	6	06	05	2.02	0003		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /	17,952,617,400	Pemberian bansos bagi DBKCHT, PKH, Sembako (BPNT)	1.764.000 Keluarga	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
									Kota							
								Rincian :								
								DBHCHT								
								Ballpoint 15 buah x Rp 7.150		107,250						
								Binder Clip 10 pak x Rp 8.800		88,000						
								Buku Kwitansi 10 pak x Rp 13.350		480,600						
								Map 90 buah x Rp 13.350		652,500						
								Amplop 3 dus x Rp 26.650		79,950						
								Karbon 100 lembar x Rp 1		100						
								Kertas HVS 50 rim x Rp 75.600		3,780,000						
								Foto Copy 13.166 lembar x Rp 400		5,266,400						
								Meterai 55 lembar x Rp 14.400		792,000						
								Tinta Printer Toner Hitam 20 bungkus x Rp 190.100		3,802,000						
								Tinta Printer (Cair) 6 botol x 167.700		1,006,200						
								Snack Mamin 1550 kotak x Rp 50.000		77,500,000						
								Honor Narsum Kepala Daerah atau Pejabat yang diselaraskan 6 O/J x Rp. 1.400.000		8,400,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Honor Narsum Pejabat Eselon IV yang disetarakan 40 O/J x Rp 400.000		16,000,000						
								Honor Narsum Eselon III 9 O/J x Rp. 900.000		8,100,000						
								Pemuatan Adv di Media Cetak Lokal Harian 1 tayangan x Rp 10.151.700		10,151,700						
								Pemuatan Adv di Media Cetak Lokal Harian 5 tayangan x Rp 2.137.200		10,686,000						
								Pemuatan Iklan Display/Berita Advertorial di Media Online (Cyber) 1 tayangan x Rp 2.671.500		2,671,500						
								Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II 1 H x Rp 1.605.000		1,605,000						
								Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV 2 H x Rp 1.076.000		2,152,000						
								Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III 2 H x Rp 664.000		1,328,000						
								Penginapan Non PNS 5 oh x 300.000		1,500,000						
								Perjalanan Dinas Eselon II.b 5 O/H x Rp 400.000		2,000,000						
								Perjalanan Dinas Eselon III 20 O/H x Rp 375.000		7,500,000						
								Perjalanan Dinas Eselon IV 20 O/H x Rp 350.000		7,000,000						
								Perjalanan Dinas Non PNS 21 O/H x 250.000		5,250,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 325 O/H x Rp. 100.000		32,500,000						
								Bantuan Transport Peserta 110								

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								O/H x Rp. 100.000		11,000,000						
								BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok 8.938x4=35.752 35.752x250.000=8.938.000.000 35.752 O x2 Rp 250.000		8,938,000,000						
								Tarif Layanan Wesel Pos (Wilayah Kab. Mojokerto) 8.938 O x Rp 15.000		134,070,000						
								Sewa Kendaraan Penumpang (Minibus/Hiace) 1 unit x Rp 2.274.500		2,274,500						
								BPNT								
								Ballpoint 5 buah x Rp 7.150		35,750						
								Snelhekteer plastik 24 buah x 8.000		192,000						
								Buku Kwitansi 6 buku x Rp 13.350		80,100						
								Map 12 buah x Rp 13.350		87,000						
								Amplop 1 dus x Rp 26.650		26,650						
								Isi Staples Kecil 2 pak x Rp 7.800		15,600						
								Kertas HVS 5 rim x Rp 75.600		378,000						
								Foto Copy 1.058 lembar x Rp 400		423,200						
								Tinta Printer (Cair) 2 botol x 167.700		335,400						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 1 O/H x Rp. 250.000		250,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Fungsional Umum Gol. III 1 O/H x Rp 325.000		325,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Perjalanan Dinas Eselon IV 1 O/H x Rp 350.000		350,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 1 O/H x Rp. 375.000		375,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 20 O/H x Rp. 100.000		2,000,000						
								SEKOLAH RAKYAT								
								Ballpoint 12 buah x Rp 7.150		85,800						
								Binder Clip 5 pak x Rp 8.800		77,750						
								Buku Kwitansi 10 pak x Rp 13.350		320,400						
								Map 90 buah x Rp 13.350		362,500						
								Amplop 3 dus x Rp 26.650		26,650						
								Karbon 100 lembar x Rp 1		300						
								Kertas HVS 15 rim x Rp 68.100		1,021,500						
								Foto Copy 1119 lembar x Rp 400		447,600						
								Meterai 25 lembar x Rp 14.400		360,000						
								Tinta Printer Toner Hitam 5 bungkus x Rp 190.100		950,500						
								Tinta Printer (Cair) 10 botol x 167.700		1,677,000						
								Snack Mamin 1000 kotak x Rp 50.000		50,000,000						
								Honor Narsum Pejabat Eselon IV yang disetarakan 8 O/J x Rp 400.000		3,200,000						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 50 O/H x		5,000,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Rp. 100.000								
								Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Pendidikan 35.964 M2 x Rp. 215.000		7,732,260,000						
								Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 2 x Rp. 99.839.400		199,678,800						
								Honor Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Anggota) 12 ob x Rp. 500.000		6,000,000						
								Jasa Sertifikasi		498,531,200						
								PKH								
								Map bufalo 5pak xRp.7.250		36,250						
								Kwitansi 16 buku x Rp.13.350		213,600						
								Karbon 350 buah x Rp. 1		350						
								Kertas hvs 364 rim x Rp. 75.690		27,518,400						
								Photo copy 1351 lembar x Rp.400		540,400						
								Tinta botol 80 buah x Rp. 167.700		13,416,000						
								Snack 160 kotak x Rp. 20.000		3,200,000						
								Perjalanan dinas biasa eselon II 1 ok x Rp. 400.000		400,000						
								Perjalanan dinas biasa eselon III 3 ok x Rp. 375.000		1,125,000						
								Perjalanan dinas biasa eselon IV 3 ok x Rp. 350.000		1,050,000						
								Non pns 4 ok x Rp. 250.000		1,000,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Perjalanan dinas dalam kota 45oh x Rp.100.000		4,500,000						
								Perjalanan dinas dalam kota (transport sdm pkh) 990 ok x Rp.100.000		99,000,000						
	6	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	46,780,000		55%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING
	6	06	05	2.02		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	46,780,000		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	05	2.02	0004		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	46,780,000	Pemberian bansos bagi pokmas	20 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Amplop putih 2 Dos x Rp. 27.750		55,500						
								bolpoint 4 buah x Rp. 7150		28,600						
								buku kwitansi 10 buku x Rp. 13.350		133,500						
								map buffalo 30 buah x Rp. 7,250.		217,500						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								snalhecter plastik 30 buah x Rp. 8.000		240,000						
								Kertas HVS 9 Rim x 75,600Rp.		680,400						
								Banner Promkes 6 M2 X Rp. 64.200		385,200						
								Photo Copy 1433 lembar x Rp. 400		573,200						
								tinta 5 botol x Rp. 167,700		838,500						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 24 orang X Rp. 100.000,-		2,400,000						
								Bantuan Sosial Uang Kepada KPM PKH 20 Orang		41,227,400						
								pembulatan		200						
	6	06	06			Program Penanganan Bencana			Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	93,459,500		50%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS
	6	06	06	2.01		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	81,100,000		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	06	2.01	0001		1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /	73,800,000	Penyediaan permakanan bagi korban bencana alam dan sosial	500 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
									Kota							
								Rincian :								
								Penisian Tabung Lpg 12 Kg 20 Tabung x Rp. 294.200,-		5,884,000						
								fotocopy 241 lembar x Rp. 400		96,400						
								Beras 1.500 Kg x Rp. 19.100,-		28,650,000						
								Mie Instan 65 Dos x Rp. 181.650		11,807,250						
								Minyak Goreng 160 pcs x Rp. 56 400,-		9,024,000						
								Telur 60 Kg x Rp. 36.150,-		2,169,000						
								Daging Ayam 60 Kg x Rp. 50.100		3,006,000						
								Tahu 1000 Biji x Rp. 4.800,-		4,800,000						
								Tempe 400 Papan x Rp. 8.350,-		3,340,000						
								Kecap 144 Botol x Rp. 26,650		3,823,200						
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 12 orang X Rp. 100.000,-		1,200,000						
								Pembulatan		150						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	06	2.01	0002		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	4,800,000	Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial	250 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Selimut 30 Buah x Rp. 160.000,-		4,800,000						
	6	06	06	2.01	0005		3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	2,500,000	Dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	250 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day-fullday 25 Orang x Rp. 100.000,-		2,500,000						
	6	06	06			Program Penanganan Bencana			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	12,359,500		50%	DAU	DINAS SOSIAL		Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
	6	06	06	2.01		1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	12,359,500		%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	06	2.02	0002		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	12,359,500	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan TAGANA dalam penanganan bencana	46 Orang	DAU	DINAS SOSIAL		
								Rincian :								
								Amplop putih 2 dos x Rp. 25.650		53,300						
								bolpoint 12 buah x Rp. 7.150		85,800						
								buku kwitansi 6 x Rp. 13.350		80,100						
								map uffalo 50 x Rp. 7.250		362,500						
								paper klip 5 x Rp.6.150		30,750						
								kertas hays 5 rim x Rp. 68.100		340,500						
								Fotocopy 412 x Rp. 400		164,800						
								tinta 8 botol xRp. 167,700		1,341,600						
								konsumsi kudapan/ snack 180 x Rp. 20.000		3,600,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat		1,400,000						

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda 4 Orang x Rp. 350.000								
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil 6 Orang x Rp. 250.000		1,500,000						
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/Pengawas Madya 4 Orang x Rp. 375,000		1,500,000						
								Uang Harian Pertemuan diluar kantor dalam kota Fullday/ Half day 19 orang x Rp. 100.000		1,900,000						
								Pembulatan		150						
	6	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	9,500,000		100%	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	07	2.01		1	Pemeeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	9,500,000		6 Makam	DAU	DINAS SOSIAL		
	6	06	07	2.01	0002		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	9,500,000	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	6 Makam	DAU	DINAS SOSIAL		

No.	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	RINCIAN PENGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	LOKASI	KETERANGAN	DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI
								Rincian :								
								Cat Tembok 5 Kg 30 Galon (1 Galon x Rp. 176.200)		5,286,000						
								Kuas Cat 8 Buah (1 Buah x Rp. 20.950)		167,600						
								Kapi Cat 4 Buah (1 Buah x Rp. 17.250)		69,000						
								Karbon		300						
								Fotokopi 41 lbr x 400		16,400						
								Sapu Lidi 6 Buah (1 Buah x Rp. 52.750)		316,500						
								Cikrak 6 Buah (1 Buah x Rp. 40.700)		244,200						
								Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30 Orang/Hari (1 Orang x Rp. 100.000)		3,000,000						
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4 Orang (1 Orang x Rp. 100.000)		400,000						

BAB IV

PENUTUP

3.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Renja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025:

- a. Perlu adanya perhatian lebih untuk SPM dalam penyusunan Sub. Kegiatan (khususnya SPM) untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. Adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2025 tidak teranggarkan;
- c. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

3.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Didalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

3.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Didalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat

operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Mardianto, S.STP., M.AP
NIP 198705192006021002